



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

RENSTRA

PERUBAHAN 2017-2022



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyediaan instrumen pengukuran kinerja instansi pemerintah yang berkorelasi dengan pencapaian visi, misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022.

Perubahan dilakukan dalam bentuk penyesuaian terhadap hasil review pelaksanaan Renstra yang mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi.
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.
5. Penyederhanaan kegiatan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr/ Drs. NAZIARTO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP 19640321 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.3
1.4 Sistematika Penulisan	I.4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.1
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.5
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	II.8
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH ..	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.6
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III.9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah	IV.1
A. Tujuan	IV.1
B. Sasaran.....	IV.2
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	V.1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VI.1
BAB VII PENUTUP	VII. 1

DAFTAR DIAGRAM

No	<i>Judul</i>	Hal
2.1	Komposisi Pegawai dan Honorer Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.6
2.2	Tingkat Pendidikan Formal Pegawai dan Honorer Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.7

DAFTAR TABEL

No	<i>Judul</i>	Hal
II.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	II.5
II.2	Tingkat Pendidikan Formal Pegawai dan Honorer Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.6
III.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	III.3
III.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah	III.9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah bagian dari proses kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu bahwa setiap Sekretariat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu proses perencanaan strategis organisasi untuk menentukan strategi, arah dan tujuan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam rangka mencapai strategi dimaksud.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Penetapan petunjuk atau pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Tugas Pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta pelayanan administratif.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, merupakan salah satu kewajiban pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas

sesuai tupoksi Sekretariat Daerah, khususnya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada misi kelima Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penguatan fungsi unsur penunjang pelayanan pemerintahan.

Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 19 ayat (4) dimaksudkan pula sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Sekretariat Daerah/organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan yang diterjemahkan ke dalam rencana program dan kegiatan dalam rangka mensinergikan dan menselaraskan kebijakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih.

Mengingat Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 serta memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, maka hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor akan selalu diperhitungkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E)
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 seri C)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dimaksudkan untuk menjabarkan Perda tentang RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta

menjadikannya sebagai arah dan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur penunjang tugas pimpinan daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini disusun dengan tujuan:

- a. Menjadi tolak ukur Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Menjadi pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang penyusunan RENSTRA Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta kedudukan dan keterkaitannya dengan RPJMD dan dokumen lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Menggambarkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kondisi organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat Daerah.

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Memberikan gambaran umum tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Menjelaskan secara umum tantangan dan peluang pengembangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Menjelaskan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Mengemukakan tugas dan fungsi Sekretariat yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Merupakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan ringkasan Renstra Perubahan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Renstra Perubahan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan secara administratif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi.
- d. Pelayanan Administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, secara struktural, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari : 1 (Satu) Sekretaris Daerah, 3 (Tiga) Asisten, 7 (tujuh) Kepala Biro dan **27** (dua puluh tujuh kepala bagian) serta 81 (delapan puluh satu kepala sub bagian).

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Biro Pemerintahan, membawahkan:
 - i. Bagian Administrasi Kewilayahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan.

- ii. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - b. Sub Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan Legislatif.
 - c. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan.
 - iii. Bagian Kerja Sama, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitas Instansi Vertikal.
 - b. Sub Bagian Kerja sama Swasta dan Luar Negeri.
 - c. Sub Bagian Kerja sama Antar Daerah.
2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
- i. Bagian Fasilitas Kegamaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Urusan Perhajian, Wakaf dan Zakat.
 - c. Sub Bagian Kelembagaan dan Bina Kerukunan Beragama.
 - ii. Bagian Pendidikan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - iii. Bagian Sosial, Kesehatan dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesehatan.
 - b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Biro Hukum, membawahkan :
- i. Bagian Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Daerah.
 - b. Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
 - c. Sub Bagian Naskah Hukum Lainnya.
 - ii. Bagian Pelayanan Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sengketa Hukum
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum

- c. Sub Bagian Penyeluhan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- iii. Bagian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan Hukum.
 - b. Sub Bagian Publikasi Informasi Hukum.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - i. Bagian Adminstrasi Perekonomian dan Perencanaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi dan Prasarana Perekonomian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program Sekretariat Daerah.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
 - ii. Bagian Sumber Daya Alam, BUMD dan Penyertaan Modal, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah.
 - b. Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - c. Sub Bagian Pariwisata dan Budaya, BUMD, Penyertaan Modal.
 - iii. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
 - b. Sub Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan.
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
 - i. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - ii. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi.
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
- iii. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

III. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Biro Organisasi, membawahkan :
 - i. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Organisasi.
 - b. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
 - c. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.
 - ii. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Sub Bagian Reformasi Birokrasi.
 - c. Sub Bagian Budaya Kerja.
 - iii. Bagian Tata Laksana, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan.
 - b. Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
2. Biro Umum, membawahkan :
 - i. Bagian Rumah Tangga dan Protokol, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - b. Sub Bagian Protokol.
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Staf Ahli.
 - ii. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- b. Sub Bagian Pengandaan dan Pemeliharaan.
- c. Sub Bagian Inventarisasi dan Penyimpanan.
- iii. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Urusan Gaji.
 - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas.
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Staf Ahli

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

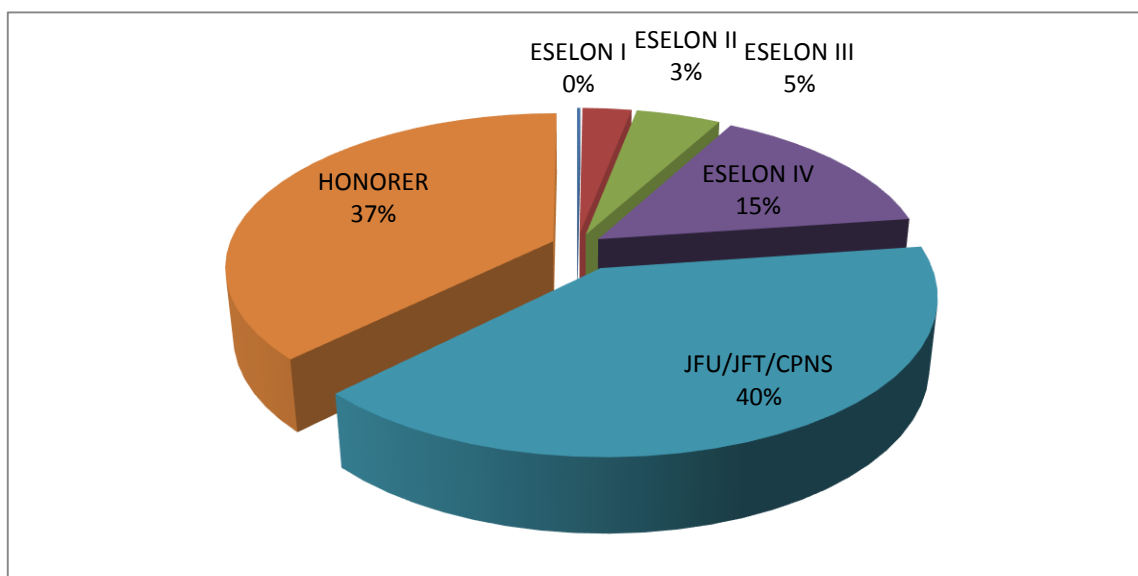
1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil termasuk honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 527 orang, untuk komposisi pegawai/honorer beserta tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel dan Diagram berikut.

TABEL II.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON

NO	JABATAN	JUMLAH
1	ESELON I	1
2	ESELON II	15
3	ESELON III	26
4	ESELON IV	78
5	JFU/JFT/CPNS	210
6	HONORER	197
Total		527

DIAGRAM 2.1
KOMPOSISI PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2. Tingkat Pendidikan Pegawai

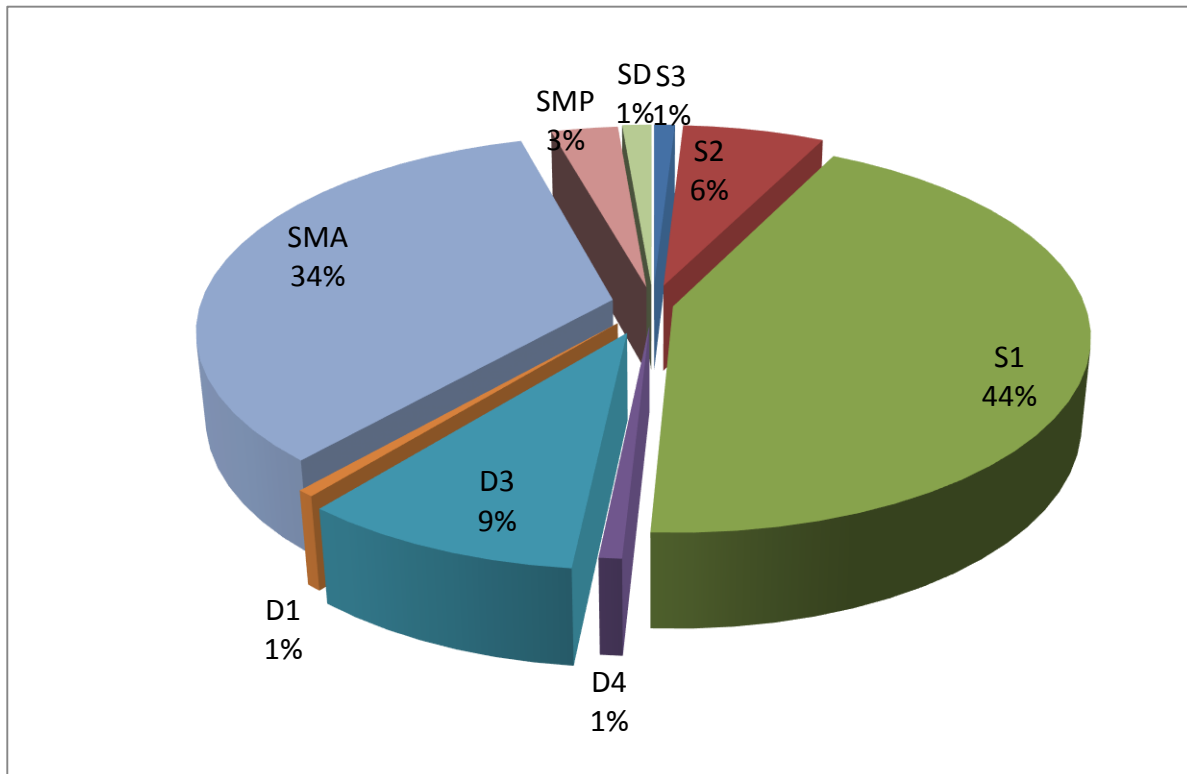
Tingkat pendidikan formal pegawai dan honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.2
TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	5
2	S2	34
3	S1	229
4	D4	4
5	D3	49
6	D1	3
7	SMA	180
8	SMP	16
9	SD	7
Total		527

DIAGRAM 2.2

**TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja PD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun pada Sekretariat Daerah masing-masing Biro adalah Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun (2012-2017) dapat dilihat pada tabel II.3

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi kepada pelayanan selaku unsur penunjang urusan pemerintahan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sekretariat daerah. sebagai berikut :

Tantangan :

1. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Tingginya tuntutan masyarakat tentang pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Ketidak selarasan hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Perbedaan persepsi para stake holder pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
5. Belum optimalnya kerjasama;
6. Lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan;
7. Kurangnya SDM yang profesional dan berkualitas;
8. Belum optimalnya pengelolaan makro dan mikro ekonomi

Peluang :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan Daerah;
2. Adanya dukungan yang besar dari Gubernur terhadap peran Sekretariat Daerah;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Tingginya apresiasi perangkat daerah dan masyarakat terhadap kedudukan Sekretariat Daerah;
5. Tingginya dinamika sosial, ekonomi dan budaya daerah.
6. Tersedianya Jumlah SDM.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan dukungan kebijakan, dituntut untuk mampu berperan sebagai perangkat daerah yang mampu meningkatkan kualitas kebijakan pimpinan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik *(good governance)*. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal, permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainnya.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan rakyat disebabkan kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan masyarakat.
3. Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis.
4. Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal.
5. Belum optimalnya sistem pengendalian pembangunan, monitoring APBD dan APBN.
6. Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel.

7. Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal.
8. Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal.
9. Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan , yaitu:

1. Mengoptimalkan tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainya sehingga dapat mewujudkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan peran perangkat daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kepentingan umum.
4. Mengoptimalkan pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pengendalian pembangunan, monitoring serta evaluasi APBD dan APBN.
6. Mengoptimalkan proses pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah
8. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik.

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	BIRO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	BIRO PEMERINTAHAN	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainnya	tata kelola administrasi pemerintahan, Kewilayahan belum baik	Kurangnya koordinasi Biro pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten Kota serta pemangku kepentingan terkait
			Kewenangan Provinsi, Kab/Kota masih tumpang tindih (overlapping)	Belum jelasnya regulasi di tingkat pusat
			Kerjasama yang belum maksimal	Belum jelasnya institusi yang menangani kerjasama pemerintah provinsi dengan pemangku kepentingan

2	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Masyarakat kurang mendapatkan informasi	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
			Kualitas Kebijakan rendah	kurangnya koordinasi Biro Kesra dengan Perangkat Daerah
3	BIRO HUKUM	Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis	Masih terdapat inkonsistensi peraturan perundang-undangan	Dinamika perubahan regulasi dari pemerintah yang cepat
			Substansi hukum tidak diketahui masyarakat	Kurangnya penyampain informasi hukum kepada masyarakat
4	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal	Tata kelola perekonomian daerah belum maksimal	Kurangnya regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
		Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan terhambat	Serapan realisasi anggaran tidak tepat waktu

			Data serapan anggaran belum bisa diketahui secara cepat	Belum adanya sistem pengendalian yang cepat dan akurat
5	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan pengadaan barang jasa tidak tepat waktu, tidak hemat biaya, dan tidak berkualitas	kurangnya kematangan kinerja pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria timeless (tepat waktu), cost saving (Penghematan biaya), kriteria Quality (kualitas baik)
6	BIRO ORGANISASI	Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal	Pola kerja antar perangkat daerah kurang sistematis	Kurangnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
			Organisasi perangkat daerah tidak bisa merespon perubahan sesuai dengan tuntutan peran maksimal pemerintah provinsi dalam pembangunan	Kurangnya penataan kelembagaan perangkat daerah

			Masyarakat kurang respon terhadap proses pembangunan	Kurangnya kualitas pelayanan publik
7	BIRO UMUM	Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal	Kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan terhambat	Kurangnya sarana prasana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik	Masyarakat tidak mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kurangnya transparansi penyampain informasi publik

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mencakup pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RJPMD 2017-2022. Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan prinsip-prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam RJPMD 2017-2022. Di dalam upaya mendukung visi dan misi tersebut, terdapat faktor-faktor penghambat antara lain dimungkinkan adanya unsur tekanan politis dan kepentingan golongan atau individu di dalam visi dan misi yang ditetapkan.

Adapun visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud adalah:

Visi:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Mengacu Visi, Misi tersebut diatas, sebagai bentuk nyata untuk mendukung ketercapaian Visi, misi, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan utama melalui misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi” Untuk mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan
2. Program Pengembangan Otonomi Daerah
3. Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan

5. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB dan Pemuda
6. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah
9. Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum
10. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian
11. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam
12. Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya
13. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd
14. Program Perencanaan Setda
15. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Apbn
16. Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan
17. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
18. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
19. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
20. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan
21. Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah
22. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah
23. Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
24. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT
25. Program Peningkatan Pelayanan Protokoler

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah adalah suatu keadaan yang perlu diatasi dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel III.2

Tabel III.2

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SEKRETARIAT
DAERAH
TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI KEPALA DAERAH**

MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi	Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, serta Penyelenggaraan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan lembaga atau instansi lainnya	tata kelola administrasi pemerintahan, Kewilayahan belum baik	Adanya upaya Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik
	Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Kualitas Kebijakan rendah	Adanya tuntutan dari berbagai pihak terkait atas peningkatan pelayanan yang diberikan

	Penyelenggaraan dibidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan informasi hukum yang masih belum harmonis	Masih terdapat inkonsistensi peraturan perundang- undangan	1. Tuntutan publik untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government. 2. Tuntutan pelaksanaan reformasi regulasi
	Pengendalian dan Penyelenggaraan makro dan mikro ekonomi yang belum optimal	Tata kelola perekonomian daerah belum maksimal	Adanya upaya peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi kewilayahan, mendor ong laju investasi, percepatan pembangunan infrastrukturpedesaa n, sekaligus mengembangkan potensi unggulan denganmengakselera si secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraanrakyat
	Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan terhambat	Adanya teknologi (e- monev, tepra) yang semakin maksimal

	Belum optimalnya proses Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel	Pelaksanaan pengadaan barang jasa tidak tepat waktu, tidak hemat biaya, dan tidak berkualitas	Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan good governance
	Penyelenggaraan tata laksana, kelembagaan serta pengembangan kinerja ASN dan pemerintah daerah yang belum optimal	Pola kerja antar perangkat daerah kurang sistematis	Adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berupa kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
	Pelaksanaan pelayanan umum dan kesekretariatan yang belum optimal	Kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan terhambat	Adanya tuntutan perbaikan layananan pimpinan, tamu dan penyediaan sarana prasarana yang lebih baik
	Belum optimalnya pelayanan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik	Kurangnya transparansi penyampain informasi publik	Tersedianya sarana prasarana teknologi dan informasi yang semakin lengkap dan memadai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan penjelasan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah yang ingin diwujudkan sampai tahun 2022 sebagai berikut:

A. TUJUAN

1. Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat
2. Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat
3. Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan
4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi
5. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
6. Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
7. Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian
8. Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan
9. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara
10. Birokrasi yang bersih dan akurat
11. Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda
12. Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas

B. SASARAN

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sasaran, diuraikan sebagai berikut :

I. Biro Pemerintahan

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama
4. Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampiakan pendapat/aspirasi

II. Biro Kesra

1. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan
2. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos
3. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata

III. Biro Hukum

1. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum

IV. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

1. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam
2. Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan

V. Biro Layanan pengadaan

1. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif

VI. Biro Organisasi

1. Meningkatnya nilai manajemen perubahan
2. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi
3. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda
4. Meningkatnya nilai akuntabilitas
5. Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik

VII. Biro Umum

1. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
2. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan
3. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan
2. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Strategi dan arahan kebijakan pada bab sebelumnya maka ditetapkan program yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja. Adapun program yang ditetapkan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
- c. Kegiatan Administrasi Umum
- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
- c. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
- b. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan

4. Program Penataan Administrasi Umum

- a. Kegiatan Penataan Organisasi
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum
- c. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan

6.1 INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Kelompok sasaran utama sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan adalah pimpinan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta program/kegiatan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6.2 PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk Tahun 2017-2022 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keterkaitan antara program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan dan kelompok sasaran serta Pendanaan Pagu Indikatif dapat dilihat pada lampiran V.1. dan V. 2

Tabel V. 1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2017-2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		LOKASI
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	48.394.471.715	100	50.942.622.648	100	53.489.753.780	100	56.152.741.468	100	58.957.878.540	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100	25.427.230.605	100	26.765.505.900	100	28.103.781.195	100	29.508.970.254	100	30.984.418.766	Povinsi, SKPD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	18.575.761.110	100	19.553.432.748	100	20.531.104.385	100	21.557.659.604	100	22.635.542.584	Povinsi, SKPD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	100	982.720.000	100	1.031.856.000	100	1.083.448.800	100	1.137.621.240	100	1.194.502.302	Povinsi, SKPD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (Orang)	150	559.400.000	150	600.000.000	150	630.000.000	150	650.000.000	150	680.000.000	Povinsi, SKPD
5	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Prosentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah (%)	100	2.849.360.000	100	2.991.828.000	100	3.141.419.400	100	3.298.490.370	100	3.463.414.888	Povinsi, SKPD

2	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	100	818.556.850	100	1.306.000.000	100	1.366.000.000	100	1.436.715.000	100	1.504.965.750	
1	Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah sarana prasarana perekonomian yang representative (Laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
2	Monitoring pengawasan supply dan demand barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data Peredaran barang dan jasa (laporan)	1	0	1	101.000.000	1	101.000.000	1	101.000.000	1	101.000.000	Povinsi, SKPD
3	Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan harga jual dan stabilnya harga penjualan hasil (%)	100	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Povinsi, SKPD
4	Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian inflasi daerah (Rekomendasi)	5	198.500.000	4	310.000.000	3	320.000.000	2	330.000.000	1	340.000.000	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data koperasi dan UKM yang aktif di Prov.Kep.Babel (Berkas)	1	0	1	125.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung,

													<i>Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah kerjasama di Prov.Kep.Babel (Laporan)	1	0	1	0	1	0	1	50.715.000	1	100.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
7	Monitoring dan Evaluasi pengembangan industri hilir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah industri hilirisasi di Prov.Kep.Babel (Laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	<i>Povinsi, SKPD</i>
8	Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Baru (Laporan)	1	117.856.050	1	220.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	<i>Povinsi, SKPD, Belitung</i>
9	Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi (Rekomendasi)	2	117.100.800	2	140.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	138.965.750	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
10	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah UMKM yang aktif di Prov.Kep.Babel (Laporan)	1	166.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
11	Forum Pengembangan Ekonomi	Jumlah laporan antara OPD Provinsi, Kab/Kota (Laporan)	1	119.100.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	1	240.000.00	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah,</i>

													Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
3	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	644.924.775	100	882.500.000	100	916.625.000	100	952.456.250	100	990.079.063	
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan Subsidi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rasio Jumlah Rekomendasi bidang energi dengan Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Dokumen)	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Povinsi, SKPD
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah masyarakat penerima Gas Elpiji 3Kg dan BBM (Laporan)	1	153.324.000	1	162.500.000	1	162.500.000	1	162.500.000	1	162.500.000	Luar Daerah, Provi nsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan kerjasama investasi pertambangan (Laporan)	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.125.000	1	135.956.250	1	100.000.000	Povinsi, SKPD
4	Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan pengawasan AMDAL (%)	100	50.000.000	100	70.000.000	100	104.000.000	100	104.000.000	100	104.000.000	Povinsi, SKPD

5	Kajian Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Balai Benih Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang pertanian yang dikeluarkan dengan yang ditindaklanjuti (Dokumen)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
6	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	Jumlah Laporan Komoditi Pangan (Laporan)	1	137.765.700	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
7	Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah potensi energi baru terbarukan (laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
8	Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi dan kerjasama antar tim terpadu penanganan masalah pertambangan timah (Rekomendasi)	4	203.835.075	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
9	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi komoditi lada di Prov. Kep. Babel	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pertanian yang dikeluarkan	1	0	1	0	1	0	1	0	1	73.579.063	Povinsi, SKPD

		dengan yang ditindaklanjuti (laporan)											
10	Koordinasi Pemerataan dan percepatan penggunaan energi alternatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah potensi energi alternatif (laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
4	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	100	2.350.877.200	100	3.260.000.000	100	2.200.000.000	100	2.350.000.000	100	2.640.000.000	
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Data potensi investasi Babel (laporan)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Povinsi, SKPD
2	Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Jumlah dokumen Pembentukan bank umum syariah Bangka Belitung (Dokumen)	1	762.011.400	1	1.500.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
3	Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi (Kesepakatan)	3	117.100.800	3	150.000.000	3	200.000.000	3	210.000.000	3	220.000.000	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka, Belitung, Belitung Timur,

													<i>Pangkalpinang</i>
4	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Laporan)	1	100.000.000	1	120.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	100.000.000	<i>Luar Daerah, Povinsi, SKPD, Bangka, Belitung</i>
5	Penyusunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (Dokumen)	7	300.000.000	7	320.000.000	7	340.000.000	7	360.000.000	7	380.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	Jumlah benda cagar budaya atau benda diduga caga budaya (dokumen)	7	300.000.000	7	320.000.000	7	340.000.000	7	360.000.000	7	380.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
7	Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pengembangan destinasi wisata baru (Laporan)	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
8	Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berkas)	1	99.100.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	480.000.000	<i>Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka,</i>

													<i>Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
9	Penyusunan SOP BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data SOP (dokumen)	7	349.845.000	7	350.000.000	7	360.000.000	7	370.000.000	7	380.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
10	Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data potensi investasi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dokumen)	7	222.820.000	7	230.000.000	7	240.000.000	7	250.000.000	7	270.000.000	<i>Povinsi, SKPD</i>
5	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota	75	475.514.731	80	1.407.072.623	85	1.208.633.140	90	1.705.575.913	95	1.817.671.421	
1	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	Jumlah Aplikasi e-Monev APBN (Aplikasi)	1	257.308.000	1	436.643.000	1	429.852.588	1	494.330.476	1	568.480.047	<i>Luar Daerah,Provi nsi, SKPD, Bangka Barat,Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
2	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	Jumlah Laporan (Laporan)	2	161.256.731	2	243.864.764	2	280.444.479	2	322.511.150	2	370.887.823	<i>Pangkalpina ng</i>
3	Koordinasi Kebijakan APBN	Rekomendasi Evaluasi APBN (Rekomendasi)	1	56.950.000	1	161.200.000	1	185.380.000	1	213.187.000	1	245.165.050	<i>Provinsi</i>
4	Penyusunan Pergub / Revisi Pergub tentang	Jumlah Peraturan Gubernur (Pergub)	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	<i>Provinsi</i>

	Pengendalian Dana APBN												
5	Penyusunan Kebijakan Implementasi Jaringan Aplikasi E-Monev APBN	Jumlah Dokumen Kebijakan (Dokumen)	0	0	1	165.000.000	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
6	Pemuthahiran Aplikasi E-Monev APBN	Jumlah Aplikasi E-Monev APBN (Aplikasi)	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	Pangkalpinang
7	Penggunaan Aplikasi E-Monev APBN	Jumlah SDM yang memahami Aplikasi (Orang)	0	0	50	250.364.859	50	312.956.073	50	375.547.287	50	483.138.501	Pangkalpinang
6	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	77.460.000	5.385.583.757	81.000.000	700.574.000	85.000.000	5.735.910.000	89.500.000	772.570.000	94.500.000	5.810.778.000	
		Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat	30		30		40		0		0		
		persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	20		40		60		80		100		
1	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan sengketa pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (pengaduan)	6	0	6	81.300.000	6	85.300.000	6	89.500.000	6	93.978.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
2	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	terlaksananya proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30	108.400.000	9	118.345.000	6	124.260.000	3	130.470.000	3	136.900.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung,

		sebanyak 30 bidang (Bidang)											<i>Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
3	Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sengketa batas administrasi wilayah)	1	59.244.500	1	108.129.000	1	113.500.000	1	119.100.000	1	125.000.000	<i>Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
4	Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan)	Jumlah Kabupaten yang terinventarisir (Kabupaten)	6	124.370.500	0	157.000.000	0	165.300.000	0	173.600.000	0	182.000.000	<i>Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
5	Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah	Jumlah segmen batas daerah yang diinventarisir dan dipelihara (segmen batas)	6	48.806.282	30	105.000.000	30	110.250.000	30	115.750.000	30	121.550.000	<i>Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
6	Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pilar batas daerah yang terpasang (pilar batas)	5	94.762.475	10	130.800.000	10	137.300.000	10	144.150.000	10	151.350.000	<i>Provinsi, Belitung Timur, Belitung</i>

7	Pengadaan Lahan	Jumlah Lahan yang tersedia (ha)	40	4.950.000.000	0	0	30	5.000.000.000	0	0	25	5.000.000.000	Provinsi
7	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi	15	1.448.652.830	13	2.638.074.000	11	2.772.705.000	10	2.888.104.750	9	3.312.582.000	
		Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan	10		15		20		25		30		
		Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi	20		20		20		20		20		
		Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	90		90		90		100		100		
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) (Dokumen)	1	165.953.745	1	327.905.000	1	347.905.000	1	367.905.000	2	650.000.000	Provinsi
2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan	Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) (dokumen)	1	351.810.000	1	367.500.000	1	386.500.000	1	400.000.000	1	420.000.000	Provinsi, SKPD

	Pemerintahan Daerah Tahun 2017												
3	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersusunnya dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung (dokumen)	7	276.971.408	7	467.000.000	7	490.000.000	7	514.000.000	7	539.000.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
4	Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Provinsi/Kabupaten/Kota)	3	143.257.000	0	262.500.000	4	275.100.000	0	288.855.000	4	303.297.000	Provinsi, Bangka, Belitung, Pangkalpinang
5	Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH	Terselenggaranya Pelantikan KDH dan WKDH Provinsi/Kabupaten/Kota (kali)	3	116.415.704	0	210.000.000	4	220.000.000	0	213.000.000	4	242.500.000	Provinsi
6	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota	Jumlah SK PAW anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota . (surat keputusan)	0	0	5	157.000.000	5	165.375.000	5	173.643.750	5	182.325.000	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
7	Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta	Jumlah izin keluar negeri yang	10	74.753.565	10	157.000.000	10	165.375.000	10	173.643.000	10	182.300.000	Provinsi

	Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	dikeluarkan (surat izin)											
8	Rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya rapat penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kep, Bangka Belitung (kali)	1	116.015.704	1	229.587.000	1	241.100.000	1	253.155.000	1	265.800.000	Provinsi
9	Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung	terlaksananya rapat koordinasi mengenai penerapan NSPK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (kali)	1	101.165.704	1	229.582.000	1	241.100.000	1	253.153.000	1	265.810.000	Provinsi
		Jumlah peserta rakor (orang)	50		50		50		50		50		Provinsi
10	Kegiatan perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan internal Biro Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan internal Biro Pemerintahan dan evaluasi. (Dokumen)	0	0	6	105.000.000	6	110.250.000	6	115.750.000	6	121.550.000	SKPD
11	Workshop Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	workshop penataan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah (kali)	1	102.310.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	Provinsi
8	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov.	90	1.639.284.704	90	1.665.551.000	90	1.726.311.000	90	1.658.520.000	100	1.718.929.000	

		Kep. Bangka Belitung											
		Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90		90		90		90		100		
1	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kali)	2	220.949.000	2	382.389.000	2	401.508.000	2	421.580.000	2	442.650.000	Provinsi
2	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI (Kali)	1	101.320.000	1	230.464.000	1	241.980.000	1	254.080.000	1	266.780.000	SKPD
3	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan (Kali)	1	137.765.704	1	260.284.000	1	273.290.000	1	286.960.000	1	301.305.000	SKPD
4	Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Jumlah proposal bantuan hibah yang diverifikasi (proposal bantuan)	0	0	4	78.629.000	4	82.560.000	4	86.688.000	4	91.022.000	Provinsi
5	Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	jumlah rekomendasi kerjasama/perjanjian (rekomendasi)	8	197.400.000	10	144.411.000	10	151.631.000	10	159.212.000	10	167.172.000	Provinsi
6	Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	Prosentase Terlaksananya inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah (%)	100	93.150.000	100	119.374.000	100	125.342.000	100	0	100	0	Provinsi

7	Kegiatan Penyelaras program pemerintah daerah dan pusat	Pelaksanaan penyelaras program pemerintah daerah dan pusat (kali pertemuan)	4	888.700.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Provinsi
9	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Prosentase pembinaan keagamaan	100	8.394.550.000	100	12.728.933.000	100	11.595.068.000	100	11.995.068.000	100	12.395.068.000	
1	Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	persentase pembinaan masyarakat (%)	80	1.335.332.000	80	1.502.648.000	80	1.552.648.000	80	1.602.648.000	80	1.652.648.000	Provinsi
2	Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Frekuensi Peyelenggaraan Safari Ramadhan (Masjid)	17	616.530.000	17	675.100.000	17	725.100.000	17	775.100.000	17	825.100.000	Provinsi
3	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah Jamaah haji yang diberangkatan (jemaah/orang)	1.100	903.270.000	1.100	998.600.000	1.100	1.048.600.000	1.100	1.098.600.000	1.100	1.148.600.000	Provinsi
4	Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD (orang)	7	488.088.000	7	554.080.000	7	604.080.000	7	654.080.000	7	704.080.000	Provinsi
5	Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji	Jumlah Jamaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji (orang)	1.100	3.170.920.000	1.100	3.250.000.000	1.100	3.300.000.000	1.100	3.350.000.000	1.100	3.400.000.000	Provinsi
6	Persiapan Musabaqah Hafidz Qur'an Internasional	Jumlah Penyelenggaraan Hafidz Qur (Kali)	1	500.000.000	1	2.372.040.000	1	2.422.040.000	1	2.472.040.000	1	2.522.040.000	Luar Daerah
7	Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ (orang)	30	1.380.410.000	30	1.506.600.000	30	1.556.600.000	30	1.606.600.000	30	1.656.600.000	Pangkalpinang
8	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (orang)	50	0	50	336.000.000	50	386.000.000	50	436.000.000	50	486.000.000	Bangka Barat
9	Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep. Babel			0		534.965.000		0		0		0	Provinsi, SKPD

10	Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS			0		998.900.000		0		0		0	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
10	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100	1.323.400.000	100	2.010.920.000	100	2.160.920.000	100	2.310.920.000	100	2.460.920.000	
1	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Sekolah yang dinilai (sekolah)	28	297.820.000	28	384.090.000	28	434.090.000	28	484.090.000	28	534.090.000	Provinsi
2	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung (orang)	3.000	1.025.580.000	3.000	1.096.630.000	3.000	1.146.630.000	3.000	1.196.630.000	3.000	1.246.630.000	Provinsi
3	Koordinasi Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi yang dicapai (Rekomendasi)	21	0	21	530.200.000	21	580.200.000	21	630.200.000	21	680.200.000	Provinsi
11	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	100	535.189.000	100	1.067.422.000	100	1.217.422.000	100	1.317.422.000	100	1.567.422.000	
1	Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Rekomendasi)	21	0	21	430.233.000	21	480.233.000	21	530.233.000	21	580.233.000	Provinsi
2	Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah (Proposal)	200	333.985.000	200	383.985.000	200	433.985.000	200	533.985.000	200	583.985.000	Provinsi
3	Evaluasi dan Analisa Proposal Bansos dan Hibah	Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah (proposal)	500	201.204.000	500	253.204.000	500	303.204.000	500	253.204.000	500	403.204.000	Provinsi

12	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	80	1.912.323.600	85	3.420.000.000	90	3.710.000.000	95	3.970.000.000	100	4.215.000.000	
1	Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Propemperda yang selesai disusun (Usulan Propemperda)	1	959.843.600	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	1	1.600.000.000	1	1.650.000.000	Provinsi
		Jumlah Raperda yang selesai disusun (Raperda)	10		10		12		12		12		Provinsi
2	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun (Pergub)	70	567.480.000	70	500.000.000	70	600.000.000	70	700.000.000	70	800.000.000	Provinsi
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang selesai disusun (Kepgub)	900		900		900		900		900		Provinsi
3	Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang selesai disusun (NHL)	100	67.220.000	100	150.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	Provinsi
4	Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis (Rancangan PHD)	20	0	25	420.000.000	30	440.000.000	35	460.000.000	40	480.000.000	Provinsi
5	Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang Selesai dievaluasi (Raperda)	10	317.780.000	10	400.000.000	10	430.000.000	10	450.000.000	10	460.000.000	Provinsi
6	Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang telah dilakukan simplifikasi (PHD)	0	0	35	160.000.000	40	180.000.000	45	190.000.000	50	215.000.000	Provinsi
7	Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	0	1	140.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	Provinsi

8	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Aparatur yang memahami Penyusunan PHD (Orang)	0	0	50	150.000.000	55	170.000.000	60	190.000.000	65	210.000.000	Provinsi
13	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Hukum	80	955.806.626	85	1.816.000.000	90	1.970.046.250	95	2.121.045.000	100	2.295.300.438	
1	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang Melalui Tahapan Proses Penyelesaian (Kasus)	1	170.370.000	1	300.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	1	355.000.000	Provinsi
2	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Jumlah Kasus Sengketa TUN yang Melalui Tahapan Proses Penyelesaian (Kasus)	1	191.528.000	1	300.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	1	350.000.000	Provinsi
3	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota (Laporan)	1	93.865.626	1	150.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	1	220.000.000	Provinsi
4	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kab/Kota (Laporan)	1	94.444.000	1	210.000.000	1	240.000.000	1	270.000.000	1	300.000.000	Provinsi
5	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Masyarakat Miskin yang diberikan Bantuan Hukum (Orang)	40	156.966.000	40	230.000.000	45	260.000.000	50	290.000.000	55	320.000.000	Provinsi
6	Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang diberikan Penyuluhan Hukum (Orang)	200	248.633.000	350	350.000.000	350	370.000.000	350	390.000.000	350	420.000.000	Provinsi

7	Penyuluhan HAM	Terlaksananya Penyuluhan HAM (Orang)	80	0	80	136.000.000	80	140.046.250	80	151.045.000	80	160.300.438	Provinsi
8	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur yang memahami penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda (Orang)	0	0	40	140.000.000	50	150.000.000	60	160.000.000	70	170.000.000	Provinsi
14	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	80	750.391.500	85	1.510.000.000	90	1.670.000.000	95	1.830.000.000	100	2.000.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui Website JDIH (Peraturan Perundang-undangan)	75	482.138.000	95	600.000.000	100	650.000.000	110	700.000.000	120	750.000.000	Provinsi
		Jumlah Artike yang dipublikasikan melalui website JDIH (Artikel)	120		120		120		120		120		Provinsi
2	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum (Buku)	Jumah Buku Perpustakaan Hukum (Buku)	50	61.658.000	50	85.000.000	50	90.000.000	50	95.000.000	50	100.000.000	Provinsi
		Jumlah Rak (Rak)	3		1		1		1		1		Provinsi
3	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub	Jumlah Buku Katalog dan Kompilasi Perda/Pegub yang tersedia (Buku)	120	69.125.500	150	85.000.000	150	90.000.000	200	95.000.000	200	100.000.000	Provinsi
4	Penyusunan Abstar Produk Hukum Daerah	Jumlah Buku Abstrak PHD yang disusun (Buku)	0	0	100	120.000.000	100	140.000.000	100	160.000.000	100	180.000.000	Provinsi
5	Penyusunan Arsip Produk Hukum Daerah	Jumlah PHD yang diarsipkan (PHD)	0	0	500	85.000.000	550	90.000.000	600	100.000.000	600	110.000.000	Provinsi

6	Pembinaan Pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota (Kab/Kota)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
7	Sosialisasi Perda	Jumlah Perda yang di sosialisasikan (Perda)	0	0	6	95.000.000	6	110.000.000	6	120.000.000	6	130.000.000	Provinsi
8	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum yang tersusun (Rakor)	1	137.470.000	1	170.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	Provinsi
9	Publikasi Produk Hukum Daerah di Media	Tersampaikannya PHD Prov. Kep.Bangka Belitung Kepada Masyarakat Umum (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
10	Bimtek Sistem Informasi Hukum	Jumlah Aparatur yang memahami Teknis Sistem Informasi Hukum (Orang)	0	0	40	140.000.000	40	160.000.000	40	180.000.000	40	200.000.000	Provinsi
11	Rakor JDIH Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi yang disusun (Rekomendasi)	0	0	1	130.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	Provinsi
15	Program Perencanaan Setda	Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat	75	301.467.968	80	428.313.000	85	492.559.950	90	566.443.943	95	651.410.534	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	3	149.599.950	3	202.610.000	3	233.001.500	3	267.951.725	3	308.144.484	Provinsi
2	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	4	151.868.018	4	225.703.000	4	259.558.450	4	298.492.218	4	343.266.050	Provinsi
16	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik	92	779.993.020	95	1.549.651.606	97	1.780.849.347	98	2.042.976.749	100	2.340.673.261	

		Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota											
1	Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota (Laporan)	1	108.080.000	1	380.450.000	1	437.517.500	1	503.145.125	1	578.616.894	Provinsi, Belitung Timur, Pangkalpinang
2	Peningkatan Fungsi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota (Laporan)	4	578.951.855	4	662.436.606	4	761.802.097	4	876.072.411	4	1.007.483.273	Provinsi
3	Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) (Dokumen)	1	92.961.165	1	331.765.000	1	381.529.750	1	438.759.213	1	504.573.094	Provinsi
4	Koordinasi Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Penetapan Target Fisik dan Keuangan APBD Provinsi (Dokumen Laporan)	1	0	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	Provinsi
17	Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80	501.326.670	85	1.982.884.194	90	1.959.232.094	95	1.566.143.954	100	1.728.216.318	
1	Peningkatan Fungsi Sistem E-Monev APBD	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monev (Laporan)	1	0	1	602.328.194	1	627.328.194	1	652.328.194	1	677.328.194	Pangkalpinang
2	Koordinasi Penyempurnaan	Jumlah Aplikasi e-Monev APBD yang	1	398.674.000	1	538.326.000	1	619.074.900	1	711.936.135	1	818.726.555	Pangkalpinang

	Aplikasi e-Monev APBD	disempurnakan (Aplikasi)											
3	Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Monitoring (Dokumen Laporan)	1	102.652.670	1	152.650.000	1	175.547.500	1	201.879.625	1	232.161.569	Pangkalpinang
4	Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Jaringan Aplikasi e-Monev berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan (Rekomendasi)	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	Pangkalpinang
5	Penggunaan Aplikasi E-Monev APBD	Jumlah SDM yang memahami Aplikasi (Orang)	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
6	Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Rekomendasi APBD (Rekomendasi)	0	0	1	225.620.000	1	0	1	0	1	0	Pangkalpinang
7	Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi dan Laporan (laporan)	0	0	1	463.960.000	1	287.281.500	0	0	0	0	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
18	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	90	554.899.000	92	1.446.989.500	94	1.591.688.450	96	1.750.857.295	98	1.925.943.025	
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80		80		80		80		80		

1	Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Jumlah Penerapan aplikasi sistem pengelolaan informasi Pengadaan barang/jasa (Aplikasi)	1	211.370.000	1	533.841.000	1	587.225.100	1	645.947.610	1	710.542.371	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
2	Pengelolaan data dan informasi	Jumlah Admin OPD Sistem Informasi Pengadaan (Admin OPD)	42	125.128.000	42	259.050.000	42	284.955.000	42	313.450.500	42	344.795.550	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
3	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan (Dokumen)	8	112.637.000	8	411.235.000	8	452.358.500	8	497.594.350	8	547.353.785	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
4	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah SOP dan Penerapannya (Dokumen)	1	105.764.000	1	242.863.500	1	267.149.850	1	293.864.835	1	323.251.319	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
19	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	90	2.337.898.000	92	5.034.568.000	94	5.538.024.800	96	6.091.827.280	98	6.701.010.008	
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	80		80		80		80		80		
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP (Bulan)	12	1.927.350.000	12	3.540.240.000	12	3.894.264.000	12	4.283.690.400	12	4.712.059.440	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
2	Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan jasa	Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan (kali)	3	183.145.000	3	495.429.000	3	544.971.900	3	599.469.090	3	659.415.999	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur,

													Pangkalpinang
3	Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan (Kali)	2	111.378.000	2	404.888.000	2	445.376.800	2	489.914.480	2	538.905.928	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Timur, Pangkalpinang
4	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Jumlah Sosialisasi (kali)	2	116.025.000	2	594.011.000	2	653.412.100	2	718.753.310	2	790.628.641	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Timur, Pangkalpinang
20	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e - Procurement terhadap belanja pengadaan	90	2.539.128.000	92	5.020.020.500	94	5.522.022.550	96	6.074.224.805	98	6.681.647.286	
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80		80		80		80		80		
1	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE (Bulan)	12	1.195.925.000	12	2.116.136.000	12	2.327.749.600	12	2.560.524.560	12	2.816.577.016	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
2	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE (Aplikasi)	2	459.493.000	2	962.824.500	2	1.059.106.950	2	1.165.017.645	2	1.281.519.410	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka

													a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
3	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa (Aplikasi)	1	308.280.000	1	781.825.000	1	860.007.500	1	946.008.250	1	1.040.609.075	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng
4	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE (Bulan)	12	575.430.000	12	1.159.235.000	12	1.275.158.500	12	1.402.674.350	12	1.542.941.785	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
21	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya	70	2.047.186.525	75	952.670.000	80	1.067.670.000	85	1.137.670.000	90	1.262.670.000	
		Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi teknis	75		80		85		90		95		
		Persentase jumlah pejabat struktural ASN	75		80		85		90		95		

		yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi											
		Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien	70		75		80		85		90		
1	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (Dokumen)	1	81.146.000	1	132.670.000	1	142.670.000	1	152.670.000	1	162.670.000	Provinsi
2	Pembinaan uraian tugas perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terwujudnya pembinaan uraian tugas perangkat daerah di provinsi kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (%)	85	133.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
3	Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan (dokumen)	1	74.827.500	1	160.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	220.000.000	Provinsi
4	Sinkronisasi fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sinkronisasi program dan kegiatan kelembagaan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 tentang	0	87.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi

		Perangkat Daerah ()											
5	Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	tersusunnya buku rumpun jabatan fungsional Pemprop. Kep Babel (buku)	50	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
6	Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pembinaan (Dokumen)	1	83.475.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
7	penyusunan profil aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersusunnya buku profil aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	87	89.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Pangkalpinang
8	Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen evaluasi jabatan (Dokumen)	1	74.751.945	1	160.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	240.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

9	Bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya standarisasi kompetensi teknis PNS pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (buku)	50	243.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
10	Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen standar kompetensi teknis (Dokumen)	1	113.207.580	1	130.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
11	Validasi Analisis Beban Kerja Jabatan Aparatur Sipil negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Kompilasi analisis beban kerja jabatan PNS pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (buku)	50	201.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
12	Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Kompilasi hasil penetapan evaluasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50	233.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi

		yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (buku)											
13	Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja	Jumlah dokumen Anjab dan ABK (dokumen)	2	195.087.500	2	220.000.000	2	230.000.000	2	235.000.000	2	240.000.000	Provinsi
14	Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Penyusunan Jabatan Fungsional Umum dan fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung (%)	100	265.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi
22	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	70	2.868.168.893	75	4.115.000.000	80	3.922.000.000	85	4.285.000.000	90	4.720.000.000	
		Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural propinsi kepulauan bangka belitung	65		70		75		80		85		
		Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	63		65		67		70		75		
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN	96		97		99		99,5		100		
1	Penyusunan Profil Aparatur jabatan struktural	Tersusunnya laporan profil aparatur (laporan)	1	115.000.000	1	145.000.000	1	165.000.000	1	185.000.000	1	225.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkalpinang

2	Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	jumlah dokumen kesepakatan (Dokumen)	1	50.241.497	1	175.000.000	1	185.000.000	1	195.000.000	1	215.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
3	Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov Babel	laporan pembinaan dan evaluasi profil aparatur UPT (laporan)	1	33.615.875	1	145.000.000	1	175.000.000	1	195.000.000	1	245.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
4	Pengadaan aplikasi e-Sakip/penerapan aplikasi e-Sakip	Jumlah aplikasi/jumlah peserta (unit/orang)	1	150.000.000	45	175.000.000	45	175.000.000	45	175.000.000	45	175.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
5	Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di	Jumlah peserta (orang)	50	67.424.000	50	215.000.000	50	225.000.000	50	250.000.000	50	275.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk

	Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
6	Pembinaan laporan kinerja	Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten/kota)	7	175.000.000	7	200.000.000	7	225.000.000	7	255.000.000	7	250.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
7	Bimbingan teknis E-LHKPN	Jumlah peserta (orang)	50	106.301.000	50	165.000.000	50	187.000.000	50	205.000.000	50	220.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
8	Pembangunan zona integritas	Jumlah laporan (laporan)	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	195.000.000	1	225.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
9	Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil/kesepakatan rakor (dokumen)	1	127.570.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	245.000.000	1	270.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka

													<i>Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
10	Bimbingan teknis pengisian LHKPN	Jumlah peserta bimtek (wajib lapor LHKPN)	259	112.500.000	259	175.000.000	259	180.000.000	259	195.000.000	259	250.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
11	Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja tahunan (Dokumen)	1	75.331.000	1	175.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang</i>
12	Penyusunan pedoman indikator kinerja utama	Jumlah buku pedoman indikator kinerja utama provinsi (buku)	50	225.000.000	50	250.000.000	0	0	0	0	0	0	<i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur,</i>

													Pangkalpinang
13	Penyusunan Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja ASN	Jumlah rakor, bimbingan teknis dan pergub pedoman penerapan budaya kerja ASN dan Monev (laporan/ pergub/ buku)	1	250.000.000	1	270.000.000	50	275.000.000	1	295.000.000	1	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
14	Rakor pencapaian indikator kinerja utama	Jumlah laporan capaian realisasi IKU (laporan)	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	195.000.000	1	225.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
15	Penyusunan database capaian kinerja individu	Jumlah laporan (laporan)	1	225.000.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

16	Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN	Jumlah buku, bimbingan teknis dan pergub standar capaian kinerja ASN dan monev (laporan/ pergub/ buku)	0	250.000.000	0	270.000.000	0	275.000.000	0	295.000.000	0	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
17	Penyusunan standar reward capaian kinerja individu dan perangkat daerah	Rakor, bimbingan teknis dan pergub reward dan capaian kinerja PD dan monev (laporan/ pergub/ buku)	0	250.000.000	0	270.000.000	0	275.000.000	0	295.000.000	0	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
18	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah laporan (laporan)	1	63.309.781	1	270.000.000	1	275.000.000	1	295.000.000	1	315.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
19	Forum Staf Ahli Kepala Daerah	Rakor dan laporan (laporan)	1	175.000.000	1	185.000.000	1	195.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk

													<i>a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
20	Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan (laporan)	1	72.140.240	1	120.000.000	1	140.000.000	1	155.000.000	1	170.000.000	<i>Luar Daerah, Provi nsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>
21	Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah peserta (orang)	43	94.735.500	43	160.000.000	43	175.000.000	43	185.000.000	43	190.000.000	<i>Luar Daerah, Provi nsi, SKPD, Bangka Barat, Bangk a Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpina ng</i>

23	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat	0	852.840.935	0	1.900.000.000	0	2.035.000.000	0	2.220.000.000	0	2.355.000.000	
		Peningkatan kinerja sumber daya aparatur	50		55		60		65		70		
1	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP (laporan)	1	85.119.480	1	170.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
2	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik (Dokumen)	1	48.999.680	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
3	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi (Dokumen)	1	88.991.825	1	170.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur,

													Pangkalpinang
4	Peningkatan administrasi ketatausahaan	Jumlah laporanvdukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan (laporan)	1	72.493.150	1	285.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
5	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah Kegiatan Bimtek (Kegiatan)	1	97.924.275	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
6	Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP	Ketetapan atas ISO 9001 : 2008 (Dokumen)	1	149.319.550	1	200.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000	Luar Daerah,Provinsi, SKPD, Bangka Barat,Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang

7	Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB (dokumen)	1	100.324.275	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
8	Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	123.155.325	1	275.000.000	1	290.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
9	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat (dokumen)	1	86.513.375	1	150.000.000	1	165.000.000	1	175.000.000	1	185.000.000	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang
24	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi,	Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan	80	2.193.142.400	85	3.503.023.340	90	4.020.448.841	95	4.615.086.767	100	5.298.498.912	

	Publikasi Media dan IT	kehumasan, dokumentasi dan publikasi											
1	Publikasi Media Massa / Cetak	Jumlah publikasi di media massa/cetak (Tayang)	154	1.467.700.000	254	2.242.500.000	292	2.578.875.000	336	2.965.706.250	386	3.410.562.187	Provinsi, SKPD
2	Publikasi Media Elektronik/IT	Jumlah publikasi di media elektronik dan IT (Tayang)	105	299.942.025	155	458.425.765	178	527.189.630	205	606.268.074	236	697.208.285	Provinsi, SKPD
3	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Jumlah publikasi media luar (Tayang)	27	163.901.900	40	260.899.580	45	300.034.517	50	345.039.695	55	396.795.649	Provinsi, SKPD
4	Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi (Eksemplar)	4.200	241.827.425	5.520	378.407.385	6.348	435.168.492	7.300	500.443.767	8.395	575.510.332	Provinsi, SKPD
5	Media Gathering	Jumlah peserta media gathering dari media lokal dan nasional (Orang)	0	0	35	52.195.000	40	60.024.250	45	69.027.887	50	79.382.071	Provinsi, SKPD
6	Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT (Orang)	10	19.771.050	12	30.315.610	15	34.862.952	17	40.092.394	20	46.106.253	Provinsi, SKPD
7	Workshop Bidang Kehumasan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kehumasan (Orang)	0	0	50	80.280.000	55	84.294.000	55	88.508.700	60	92.934.135	Provinsi, SKPD
25	Program Peningkatan Pelayanan Protokol	Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	80	162.698.250	85	535.354.305	90	585.657.450	95	708.006.069	100	814.206.978	
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	4.550	66.562.500	5.232	78.846.875	6.017	90.673.906	6.920	104.274.992	7.958	119.916.241	Provinsi, SKPD

2	Workshop Bidang Keprotokolan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan (Orang)	60	96.135.750	70	221.802.225	80	225.072.558	90	293.333.443	100	337.333.459	Provinsi, SKPD
3	Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	Jumlah layanan tamu pemerintah dan negara (Orang)	375	0	431	84.705.205	496	97.410.986	569	112.022.634	655	128.826.028	Provinsi, SKPD
4	Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Tersedianya IT untuk keprotokolan (Aplikasi)	0	0	1	150.000.000	1	172.500.000	1	198.375.000	1	228.131.250	Provinsi, SKPD
26	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	80	1.224.371.325	85	1.975.838.255	90	2.272.213.993	95	2.613.046.093	100	3.005.003.007	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah (Eksemplar)	17.728	183.992.200	27.171	285.174.930	31.247	327.951.170	35.934	377.143.846	41.324	433.715.423	Provinsi, SKPD
2	Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan	Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah (kali)	179	259.830.650	288	396.076.330	331	455.487.780	381	523.810.947	438	602.382.589	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
3	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik (PD)	21	230.918.550	25	362.861.110	30	417.290.276	35	479.883.818	42	551.866.390	Provinsi, SKPD

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan (Buah)	4.000	533.821.375	6.277	792.152.775	7.218	910.975.691	8.301	1.047.622.044	9.546	1.204.765.351	Provinsi, SKPD
5	Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah (Orang)	2	15.808.550	6	39.573.110	8	45.509.076	10	52.335.438	12	60.185.754	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
6	Penyediaan Pakaian Khusus Lapangan Humas dan Protokol	Jumlah pakaian khusus lapangan (Stel)	0	0	55	100.000.000	63	115.000.000	73	132.250.000	84	152.087.500	Provinsi, SKPD

Tabel V.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021-2022
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sub Unit Organisasi : 7 (tujuh biro setda)

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan		
							Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional	
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
4	01			Sekretariat Daerah																
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												86.775.527.854	95.453.080.639			
										Nilai Sakip Perangkat Daerah	85					117.879.646	129.667.611			
X	XX	01	1.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												117.879.646	129.667.611			
														Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	9	117.879.646	129.667.611			
X	XX	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam						40.000.000	44.000.000			
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam		Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra, Renja, Renja Perubahan PD	3 Dokumen		40.000.000	44.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		
X	XX	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					12.626.550	13.889.205				
												Jumlah RKA/DPA yang tersusun	1 Dokumen		12.626.550	13.889.205,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		
X	XX	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					12.626.548	13.889.203				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD (DALEV)	1 Dokumen		12.626.548	13.889.202,80	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		
X	XX	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					12.626.548	13.889.203				
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam		Jumlah Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PD	1 Dokumen		12.626.548	13.889.202,80	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		
X	XX	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					40.000.000	44.000.000				
												Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD)	3 Dokumen		40.000.000	44.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		
X	XX	01								Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan	100%				53.780.178.989	59.158.196.888				
X	XX	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan										53.780.178.989	59.158.196.887,90				
														Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan	100%	53.780.178.989	59.158.196.888	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										53.780.178.989	59.158.196.888				

														Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	319 Orang				52.288.800.684,00	57.517.680.752,40	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
														Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima KDH dan WKDH	2 Orang				1.491.378.305,00	1.640.516.135,50	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01								Persentase Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%							32.567.469.219,00	35.824.216.140,90			
X	XX	01	1.03		Kegiatan Administrasi Umum													32.567.469.219,00	35.824.216.140,90			
																	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Cakupan Layanan Administrasi Umum	80%	32.567.469.219,00	35.635.428.640,90	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang								4.941.500.000,00	5.435.650.000,00			
														Jumlah surat yang dikirim	1540 surat			33.000.000,00	36.300.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
														Jumlah materai	1250 lembar			7.500.000,00	8.250.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
														Jumlah tenaga pramubakti yang diperkejakan	130 orang			4.901.000.000,00	5.391.100.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
X	XX	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung								4.201.000.000,00	4.621.100.000,00			
														Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bln			4.201.000.000,00	4.621.100.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
X	XX	01	1.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang								1.475.700.000,00	1.623.270.000,00			
														Jumlah Jasa Perlengkapan dan peralatan Kantor	12 Kali			1.438.000.000,00	1.581.800.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
														Jumlah Tenaga keamanan dan Satpam kantor yang diperkejakan	1 orang			37.700.000,00	41.470.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
X	XX	01	1.03	06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang								1.611.291.900,00	1.772.421.090,00			
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang				jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3 jenis			65.591.900,00	72.151.090,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
														jumlah tenaga pengemudi	41 org			1.545.700.000,00	1.700.270.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
X	XX	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang								691.972.250,00	761.169.475,00			
														Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	64 org			691.972.250,00	761.169.475,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
X	XX	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang								2.123.433.900,00	2.335.777.290,00			
														Jumlah pengelola kebersihan	1 pengelola			720.000.000,00	792.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
														Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	30 org			1.131.000.000,00	1.244.100.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
														Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor	3 jenis			272.433.900,00	299.677.290,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	

X	XX	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						1.026.300.000,00	1.128.930.000,00		
											Jumlah jenis peralatan kerja yang di perbaiki	7 jenis				907.500.000,00	998.250.000,00	Peningkatan Tata Kelola	Reformasi Birokrasi
											Jumlah operator genset,fotocopy, telepon/fax, liftt dan damkar	27 org				118.800.000,00	130.680.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						300.000.000,00	330.000.000,00		
											Jumlah jenis atk yang di beli	17 jenis				300.000.000,00	330.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						357.378.980,00	393.116.878,00		
											Jumlah barang cetak	12 exemplar				339.337.980,00	373.271.778,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Jumlah Penggandaan	48.000 lbr				16.841.000,00	18.525.100,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Jumlah Penjilidan	12 laporan				1.200.000,00	1.320.000,00		
X	XX	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						788.511.638,00	867.362.801,80		
											Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	11 komponen				788.511.638,00	867.362.801,80	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						75.000.000,00	82.500.000,00		
											Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia	1 jenis				75.000.000,00	82.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						75.000.000,00	82.500.000,00		
											Jumlah peralatan rumah tanggayang tersedia	2 jenis				75.000.000,00	82.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						169.953.000,00	186.948.300,00		
											Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 bln				169.953.000,00	186.948.300,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						65.069.000,00	71.575.900,00		
											Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 unit				65.069.000,00	71.575.900,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						4.250.000.000,00	4.675.000.000,00		
											Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bln				3.100.000.000,00	3.410.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Jumlah makanan dan minuman rapat/ kegiatan yang tersedia	12 bln				1.150.000.000,00	1.265.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung						3.325.149.641,00	3.657.664.605,10		
											Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	12 bln				500.000.000,00	550.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung						525.000.000,00	577.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung						2.300.149.641,00	2.530.164.605,10	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

X	XX	01	1.03	23	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						-	-		
													jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 jenis				- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	25	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						-	-		
													jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit				- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	26	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						-	-		
													jumlah Mebeleur yang diadakan	2 unit				- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	27	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						400.000.000,00	440.000.000,00		
													Jumlah rumah jabatan yang di pelihara	2 unit		400.000.000,00	440.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						854.616.260,00	940.077.886,00		
													Jumlah rumah dinas yang dipelihara	27 unit		854.616.260,00	940.077.886,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Bangka Belitung						1.729.307.200,00	1.902.237.920,00		
													Jumlah gedung kantor yang dipelihara	14 unit		1.729.307.200,00	1.902.237.920,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						1.095.536.150,00	1.205.089.765,00		
													Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 unit		1.095.536.150,00	1.205.089.765,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						2.198.577.000,00	2.418.434.700,00		
													Jumlah kendaraan dinas/operasional mobil yang dipelihara	69 unit mobil		2.026.952.000,00	2.229.647.200,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah kendaraan dinas/operasional motor yang dipelihara	27 unit motor		171.625.000,00	188.787.500,00		
X	XX	01	1.03	34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang						34.095.000,00	37.504.500,00		
													Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	5 unit		34.095.000,00	37.504.500,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor											628.077.300,00	690.885.030,00		
													Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis		203.517.300,00	223.869.030,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah BBM Genset	42456 liter		424.560.000,00	467.016.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	40	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Bangka Belitung						50.000.000,00	55.000.000,00		

														Jumlah mobil jabatan yang di rehabilitasi	4 unit				50.000.000,00	55.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	41	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung								100.000.000,00	110.000.000,00			
														Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	5 unit				100.000.000,00	110.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01								Persentase Tersedianya sarana penunjang kedisiplinan dan peningkatan Kapasitas ASN	90%							310.000.000,00	341.000.000,00			
X	XX	01	1.04		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													310.000.000,00	341.000.000,00			
																Meningkatnya Disiplin dan Kompetensi ASN	80%	310.000.000,00	341.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi	
X	XX	01	1.04	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung								160.000.000,00	176.000.000,00			
														Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH	2 paket				100.000.000,00	110.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang				Jumlah pakaian dinas Petugas Protokol beserta perlengkapannya yang diadakan	3 paket				60.000.000,00	66.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung								150.000.000,00	165.000.000,00			
														Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 org				150.000.000,00	165.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat													15.066.642.480	16.573.306.728			
										Persentase Kebijakan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Terimplementasikan	90%							15.066.642.480	16.573.306.728			
4	01	02	1.01		Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah													1.432.381.466	1.575.619.613			
																Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah yang sesuai aturan	90%	232.381.466	255.619.613			
4	01	02	1.01	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota								132.381.466	145.619.613			
														Jumlah dokumen batas wilayah yang terlaksana	7 dokumen penataan				132.381.466	145.619.612,60	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

											Jumlah dokumen rubahumitoponimi yang terlaksana	7 dokumen penataan						
											Jumlah dokumen pembentukan daerah	1 dokumen						
											Jumlah dokumen evaluasi kecamatan	53 dokumen						
											Pelaksanaan kegiatan dekonstruksi dan Tugas Pembantuan							
											Penyelenggaraan administrasi pertanahan							
											Penyusunan LPPD	1 dokumen						
4	01	02	1.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kot a	7 kabupaten/kota					100.000.000	110.000.000		
											Jumlah dokumen pelaksanaan SPM	7 dokumen			100.000.000	110.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Fasilitas pelaksanaan urusan Forkompinda							
											Pelaksanaan urusan Trantib dan Bencana							
													Persentase pelaksanaan pengembangan otonomi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	90%	1.000.000.000	1.100.000.000		
4	01	02	1.01	03	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang					400.000.000	440.000.000		
											Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kepala daerah dan DPRD yang terlaksana	5 dokumen			400.000.000	440.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Jumlah rumusan pencalonan dan pelaksanaan pilkada	4 dokumen						
4	01	02	1.01	04	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kot a	7 kabupaten/kota					150.000.000	165.000.000		
											Jumlah dokumen penataan urusan yang terlaksana	6 dokumen			150.000.000	165.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Pelaksanaan HUT RI dan HUT Provinsi	2 kali						
											Jumlah dokumen NSPK yang tersusun	6 dokumen						
4	01	02	1.01	05	Sub KegiatanEvaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kot a	7 kabupaten/kota					450.000.000	495.000.000		
											Jumlah Dokumen LKPi KDH yang tersusun	1 dokumen			450.000.000	495.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Jumlah Dokumen LPPD yang	1 dokumen						
											Jumlah dokumen EKPPD Kabupaten/Kota	7 dokumen kab/kota						
													Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah daerah	90%	200.000.000	220.000.000		
4	01	02	1.01	06	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang					200.000.000	220.000.000		
											Jumlah proposal kerjasama pemerintah daerah yang terrealisasi	5 proposal			200.000.000	220.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Evaluasi kerjasama pemerintah daerah yang terselenggara	5 dokumen						
4	01	02	1.01	07	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang					-	-		
											Terlaksananya evaluasi kerjasama pemerintah daerah	5 proposal					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.01	08	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang					-	-		
											Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan Badan	10 dokumen					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

										Persentase Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang terimplementasikan	100%					12.808.671.755,00	14.089.538.930,50		
4	01	02	1.02		Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat											12.808.671.755,00	14.089.538.930,50		
														Persentase pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat yang dibutuhkan	100%	12.808.671.755,00	14.089.538.930,50		
4	01	02	1.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Pembangunan Reformasi Birokrasi		kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang						11.523.105.000,00	12.675.415.500,00		
												Prosentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	100%			11.523.105.000,00	12.675.415.500,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	02	Sub Kegiatan Fasilitas Kelengkapan Bina Spiritual	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang						596.275.005,00	655.902.505,50		
												Prosentase Pembinaan Masyarakat dan Frekuensi Penyelenggaraan Safari Ramadhan	100%			596.275.005,00	655.902.505,50	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang						296.406.250,00	326.046.875,00		
												Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung	3.000 orang			296.406.250,00	326.046.875,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Dasar	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang						-	-		
												Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	520 proposal					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	05	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang						46.930.000,00	51.623.000,00		
												Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	7 Kabupaten/Kota			46.930.000,00	51.623.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	06	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Sosial	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang						95.955.500,00	105.551.050,00		
												Jumlah Proposal Bansos dan Hibah yang di monitoring dan evaluasi	250 proposal			95.955.500,00	105.551.050,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	07	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Pendidikan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang						250.000.000,00	275.000.000,00		
												Jumlah Sekolah yang dinilai	28			250.000.000,00	275.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Persentase Produk Hukum yang selaras dan terimplementasikan	90%				825.589.259,00	908.148.184,90		
4	01	02	1.03		Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah											825.589.259,00	908.148.184,90		
														Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah	90%	825.589.259,00	908.148.184,90		
4	01	02	1.03	01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam						400.000.000,00	440.000.000,00		

													Jumlah Pergub yg selesai disusun	70 Pergub			400.000.000,00	440.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Kep Gub yg selesai disusun	900 Kep Gub						
													Jumlah Usulan Perda yg selesai disusun	10 raperda						
													Jumlah Usulan Propemperda yg selesai disusun	1 propemperda						
4	01	02	1.03	02	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							60.000.000,00	66.000.000,00		
													Jumlah Produk Hukum yg dipublikasikan melalui JDIH	100 PHD			60.000.000,00	66.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Perda yg dipublikasikan di Media Massa	5 Perda						
													Jumlah Perda yg dipublikasikan melalui Radio	3 Perda						
													Jumlah Artikel yg dipublikasikan melalui Website	120 artikel						
													Jumlah abstrak PHD yg disusun	250 abstrak						
													Jumlah buku katalog dan kompilasi PHD yg disusun	150 buku						
													Jumlah Produk Hukum Daerah yg didokumentasikan	1000 PHD						
													Jumlah Naskah Hukum yg disusun	100 NHL						
4	01	02	1.03	03	Sub Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota							120.000.000,00	132.000.000,00		
													Jumlah Raperda Kab/Kota yg disusun	10 Raperda			120.000.000,00	132.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Perka Kab/Kota yg disusun	30 Raperkada						
4	01	02	1.03	04	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota							180.500.000,00	198.550.000,00		
4													Jumlah Kasus Sengketa Perdata yg melalui Tahapan Proses Penyelesaian	1 kasus			180.500.000,00	198.550.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Kasus Sengketa TUN yg melalui Tahapan Proses Penyelesaian	1 kasus						
													Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa	1 Laporan						
4	01	02	1.03	05	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota							65.089.259,00	71.598.184,90		
													Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan HAM	1 Laporan			65.089.259,00	71.598.184,90	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Masyarakat Miskin yg diberikan bantuan	45 Orang						
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan												3.411.459.455,00	3.790.286.078,50		
											Persentase Kebijakan dibidang ekonomi yang teimplementasikan	90%					390.523.930,00	429.576.323,00		
4	01	03	1.01		Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian												390.523.930,00	429.576.323,00		
															Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian	23 Rekomendasi	390.523.930,00	429.576.323,00		
4	01	03	1.01	01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							75.000.000,00	82.500.000,00		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Ekonomi Makro	5 rekomendasi			75.000.000,00	82.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							55.000.000,00	60.500.000,00		

															Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Ekonomi Mikro	6 rekomendasi					55.000.000,00	60.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											40.000.000,00	44.000.000,00		
															Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 rekomendasi					40.000.000,00	44.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											96.000.000,00	105.600.000,00		
															Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 rekomendasi					45.000.000,00	49.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah Kontribusi dan iuran ADPM (Asosiasi Daerah Penghasilan Migas)	10 Kali					51.000.000,00	56.100.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											25.000.000,00	27.500.000,00		
															Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Energi dan Air	2 rekomendasi					25.000.000,00	27.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											45.523.930,00	50.076.323,00		
															Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	3 rekomendasi					45.523.930,00	50.076.323,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											29.000.000,00	31.900.000,00		
															Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 rekomendasi					29.000.000,00	31.900.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	08	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											25.000.000,00	27.500.000,00		
															Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 rekomendasi					25.000.000,00	27.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 4					2.750.935.525,00	3.026.029.077,50		
4	01	03	1.02		Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											2.750.935.525,00	3.053.709.755,50		
															Nilai kematangan kinerja PBJ	Level 4					2.750.935.525,00	3.026.029.077,50	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam											100.000.000,00	110.000.000,00		
															Jumlah SOP pengadaan yang terintegrasi	4 SOP					100.000.000,00	110.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

4	01	03	1.02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							1.335.440.000,00	1.468.984.000,00		
											Jumlah paket pengadaan barang/jasa	200 paket					1.335.440.000,00	1.468.984.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	03	Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							100.000.000,00	110.000.000,00		
											Jumlah laporan pemantauan money pemantauan barang/jasa	1 Laporan					100.000.000,00	110.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							937.960.846,00	1.031.756.930,60		
											Jumlah pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 pengelolaan					937.960.846,00	1.031.756.930,60	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	05	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							50.000.000,00	55.000.000,00		
											Jumlah integrasi sistem PBJ yang dikembangkan	1 Inegresi sistem					50.000.000,00	55.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	03	1.03	06	Sub Kegiatan Layanan dan Dukungan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							-	-		
6	01	03	1.04	07	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							50.000.000,00	55.000.000,00		
											Jumlah laporan penggunaan sistem informasi PBJ secara penuh	1 dokumen					50.000.000,00	55.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
7	01	03	1.05	08	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							59.000.000,00	64.900.000,00		
											Jumlah lembaga UKPBJ yang dibina	7 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)					59.000.000,00	64.900.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Jumlah laporan Training Analisis untuk Kompetensi PB.1	1 laporan								
											Jumlah laporan pelatihan dan mentoring berbasis kompetensi	1 Laporan								
											Jumlah Laporan evaluasi Kinerja staff Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan								
4	01	03	1.02	09	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							59.000.000,00	92.580.678,00		
											Jumlah laporan tentang pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan					59.000.000,00	64.900.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	03	1.03	10	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (tidak ada di pemendagri 90)	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							59.534.679,00	65.488.146,90		
											Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan					59.534.679,00	65.488.146,90	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.04	11	Sub Bagian Tata Usaa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam										
											Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	85%					270.000.000,00	297.000.000,00		

4	01	03	1.03		Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota					270.000.000,00	297.000.000,00		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota			Persentase Capaian Realisasi Anggaran APBD	90	90.000.000,00	99.000.000,00		
4	01	03	1.03	01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota					50.000.000,00	55.000.000,00		
												Jumlah OPD yang melaporkan Realisasi Anggaran tepat waktu	42		50.000.000,00	55.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
				02	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota					40.000.000,00	44.000.000,00		
												Jumlah OPD yang telah sesuai perbandingan antara Capaian (realisasi) dan Rencana (target) pembangunan	42		40.000.000,00	44.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan APBN	85	90.000.000,00	99.000.000,00		
4	01	03	1.03	03	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota					50.000.000,00	55.000.000,00		
												Jumlah Satker (APBN/Dekon/TP) yang melaporkan realisasi anggaran tepat waktu	54		50.000.000,00	55.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
				04	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota					40.000.000,00	44.000.000,00		
												Jumlah Tindak lanjut Perumusan Kebijakan Teknis pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen		40.000.000,00	44.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Persentase Capaian Pengendalian Fisik Pembangunan	85	90.000.000,00	99.000.000,00		
4	01	03	1.03	05	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota					50.000.000,00	55.000.000,00		
												Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan realisasi fisik pembangunan tepat waktu	7 Kabupaten / Kota		50.000.000,00	55.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.03	06	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota					40.000.000,00	44.000.000,00		
												Jumlah Laporan Capaian Kinerja pembangunan	4 Laporan		40.000.000,00	44.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04			Program Penataan Administrasi Umum										4.286.402.795,00	4.715.043.074,50		
											Persentase OPD dengan type kelembagaan yang tepat dan nilai kinerja baik	80%			805.705.855,00	886.276.440,50		
4	01	04	1.01		Kegiatan Penataan Organisasi										805.705.855,00	886.276.440,50		
													Persentase Penataan Organisasi yang tepat dan nilai kinerja baik	75%	805.705.855,00	886.276.440,50		
4	01	04	1.01	01	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					80.000.000,00	88.000.000,00		

										Jumlah pelaksanaan acara yang difasilitasi dan di komunikasi	12 bin			118.500.000,00	130.350.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.03	03	Sub Kegiatan Fasilitas Tamu	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang				377.244.000,00	414.968.400,00		
										Jumlah tamu yang di fasilitasi	12 bulan			377.244.000,00	414.968.400,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang				571.406.000,00	628.546.600,00		
										Jumlah hubungan keprotokolalan yang di kelola	12 bulan			571.406.000,00	628.546.600,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													TOTAL ANGGARAN	109.540.032.584,00	120.521.716.520,40		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka ada 13 indikator yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah
2. Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan
3. Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Umum
4. Tersedianya sarana penunjang kedisiplinan dan peningkatan Kapasitas ASN
5. Kebijakan dibidang Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Terimplementasikan
6. Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang terimplementasikan
7. Produk Hukum yang selaras dan terimplementasikan
8. Kebijakan dibidang ekonomi yang teimplementasikan
9. Tingkat Kematangan UKPBJ
10. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
11. OPD dengan type kelembagaan yang tepat dan nilai kinerja baik
12. Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Umum
13. Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 merupakan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan periode Renstra ini dapat dilakukan evaluasi untuk menemukan dan menilai capaian kinerja serta usaha perbaikan dalam hal strategi dan kebijakan. Sehingga pada akhirnya seluruh target kinerja yang telah disepakati dapat tercapai.

Pencapaian kinerja secara maksimal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan dapat mendukung visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 mewujudkan Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.